



Dampak Perencanaan Teknokratis terhadap Kesetaraan Gender dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Junita Mawartina

Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja ali Haji, Indonesia

Heti Sarlini

Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja ali Haji, Indonesia

Dewi Yanti

Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja ali Haji, Indonesia

Nurain

Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja ali Haji, Indonesia

Wahjoe Pangestoe

Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja ali Haji, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Dompak, Dompak, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau

Korespondensi penulis: junitamawartina16@gmail.com, Hetisarlini530@gmail.com,

dewiyanti0960@gmail.com, ain64938@gmail.com, wahjoepangestoe@umrah.ac.id

Abstract. The Program Keluarga Harapan (PKH) is one of Indonesia's social protection policies designed using a technocratic planning approach that emphasizes data utilization, performance indicators, and efficiency in the distribution of social assistance. In its implementation, PKH places women, particularly mothers, as the primary beneficiaries and managers of the assistance, which has direct implications for gender relations and equality. This study aims to analyze the impact of technocratic planning on gender equality in the implementation of PKH. The research employs a literature review method by examining secondary sources, including academic journal articles, books, and relevant policy documents related to technocratic planning, social policy, and gender perspectives. The findings indicate that technocratic planning in PKH provides opportunities to enhance women's access to economic resources and basic social services, thereby strengthening their role in household welfare management. However, the dominance of technocratic and administrative-oriented approaches tends to limit gender responsiveness and may reinforce traditional gender roles, particularly by increasing women's double burden. Therefore, the substantive integration of gender perspectives in the planning and implementation of PKH is essential to ensure that the program is not only technocratically effective but also capable of promoting gender equality and transformative gender relations.

Keywords: technocratic planning, gender equality, Program Keluarga Harapan, social policy

Abstrak. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu instrumen kebijakan perlindungan sosial di Indonesia yang dirancang dengan pendekatan perencanaan teknokratis, yaitu menekankan penggunaan data, indikator kinerja, serta efisiensi dan efektivitas dalam penyaluran bantuan sosial. Dalam implementasinya, PKH menempatkan perempuan, khususnya ibu rumah tangga, sebagai penerima manfaat utama dan pengelola bantuan, sehingga memiliki implikasi langsung terhadap relasi dan kesetaraan gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perencanaan teknokratis terhadap kesetaraan gender dalam implementasi PKH. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan perencanaan teknokratis, kebijakan sosial, dan perspektif gender. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan teknokratis dalam PKH memberikan peluang bagi peningkatan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan layanan sosial dasar, serta memperkuat peran perempuan dalam pengelolaan kesejahteraan keluarga. Namun demikian, dominasi pendekatan teknokratis yang berorientasi pada target administratif dan kepatuhan program cenderung belum sepenuhnya responsif gender dan berpotensi mereproduksi peran gender tradisional, terutama melalui peningkatan beban ganda perempuan. Oleh karena itu, integrasi perspektif gender secara substantif dalam perencanaan dan implementasi PKH menjadi penting agar program tidak hanya efektif secara teknokratis, tetapi juga mampu mendorong kesetaraan dan transformasi relasi gender.

Kata Kunci : Perencanaan teknokratis, kesetaraan gender, Program Keluarga Harapan, kebijakan sosial

1. LATAR BELAKANG

Perencanaan teknokratis adalah metode perencanaan kebijakan publik yang menekankan pada penggunaan data, indikator kinerja, analisis rasional, efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan program. Di Indonesia, perencanaan teknokratis banyak diterapkan dalam perancangan dan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya alam.

Namun demikian, kebijakan publik yang teknokratis tidak dapat mengabaikan aspek sosial, seperti ketidaksetaraan gender. PKH secara tegas menempatkan perempuan, terutama ibu rumah tangga, sebagai penerima manfaat dan pengelola bantuan serta penanggung jawab pemenuhan kewajiban program. Penemuan ini menunjukkan bahwa perencanaan PKH teknokratis berdampak langsung pada relasi gender, baik dalam rumah tangga maupun dalam interaksi perempuan dengan negara. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian tentang bagaimana perencanaan teknokratis PKH memengaruhi kesetaraan gender, baik dalam hal pencapaian program maupun berdampak pada peran, posisi, dan beban sosial Perempuan (Nainggolan 2010).

Di satu sisi, pendekatan teknokratis untuk PKH dapat membantu kesetaraan gender dengan memperluas akses perempuan terhadap layanan sosial dan sumber daya ekonomi dasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan teknokratis PKH dapat membantu pemenuhan kebutuhan praktis gender dan memberikan ruang awal bagi pemberdayaan perempuan penerima manfaat. Bantuan tunai yang dikelola oleh perempuan juga dapat meningkatkan posisi tawar mereka dalam rumah tangga dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan dan kesehatan anak.

Sebaliknya, pendekatan teknokratis yang terlalu menekankan elemen administratif, kepatuhan, dan pencapaian indikator seringkali tidak sensitif terhadap ketidaksetaraan gender. Kewajiban PKH yang sebagian besar diberikan kepada perempuan dapat memperkuat pembagian peran gender yang ada dan menimbulkan beban ganda, terutama bagi perempuan yang berasal dari keluarga yang miskin. Ini menimbulkan pertanyaan penting tentang seberapa responsif pendekatan teknokratis PKH terhadap gender dan apakah itu mampu mendorong perubahan peran dan posisi perempuan secara lebih substansial.(Saragh 2022)

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting untuk menyelidiki bagaimana perencanaan PKH teknokratis memengaruhi kesetaraan gender; apakah pendekatan yang digunakan telah menanggapi kebutuhan dan kepentingan gender; dan bagaimana PKH memengaruhi posisi dan peran perempuan sebagai penerima manfaat. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi teoretis dan praktis untuk membangun kebijakan perlindungan sosial yang adil, teknokratis, dan transformatif secara gender.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, data penelitian diperoleh melalui studi literatur (library research) dengan menggunakan berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik perencanaan teknokratis, kesetaraan gender, dan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Data yang digunakan bersifat sekunder, yang mencakup artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku teks, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan pemerintah seperti peraturan perundang-undangan, pedoman pelaksanaan PKH, dan laporan evaluasi program bantuan sosial. Literatur yang diteliti terutama berasal dari publikasi jurnal yang kredibel agar sesuai dengan perkembangan kebijakan dan konteks aktual, khususnya terkait digitalisasi perencanaan dan pengarusutamaan gender dalam kebijakan sosial. Data dari berbagai sumber

tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi konsep, temuan empiris, dan perdebatan ilmiah mengenai pendekatan teknokratis dan dampaknya terhadap kesetaraan gender dalam program bantuan sosial. Melalui sintesis dan perbandingan hasil-hasil penelitian terdahulu, studi literatur ini memungkinkan peneliti untuk memahami pola, kesenjangan penelitian, serta kecenderungan implementasi PKH dari perspektif gender, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan analisis dan rekomendasi kebijakan yang relevan dan berbasis bukti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan teknokratis dalam Program Keluarga Harapan (PKH)

Perencanaan teknokratis merupakan pendekatan dalam perencanaan kegiatan yang menekankan pada rasionalitas, penggunaan data, indikator kuantitatif sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan publik. Pada kebijakan perlindungan sosial di Indonesia, pendekatan teknokratis digunakan untuk menjamin efisiensi suatu program dan ketepatan sasaran penerima manfaatnya.

Program Keluarga Harapan (PKH) dirancang dengan menggunakan pendekatan teknokratis pada proses penentuan dan penetapan kelayakan penerima manfaat programnya melalui pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai data utama untuk identifikasi calon penerima program PKH, yang diharapkan bantuan dapat tepat sasaran berdasarkan pada konsisi ekonomi dan sosial keluarga penerima manfaat (Nuraeni and Lilin Suryono 2021).

Dalam Program Keluarga Harapan (PKH), proses penetapan sasaran berbasis data dilakukan dalam beberapa tahapan dimulai dari Pencatatan Data Kesejahteraan Sosial (DTKS), dengan pengumpulan data, pembaruan, dan pemeriksaan dari tingkat desa dan kecamatan hingga pusat. Secara teknokratis, rumah tangga yang jelas diidentifikasi sebagai calon penerima PKH adalah mereka yang berstatus sosial-ekonomi rendah, yang berarti dalam praktiknya mereka memenuhi kondisi hidup materi minimal, memiliki akses ke pendidikan dan fasilitas kesehatan dasar, serta tidak memiliki properti atau rumah, dan sebagainya. Mekanisme ini dirancang untuk mengurangi kesalahan pada penargetan penerima manfaat dan meningkatkan akurasi penentuan penerima manfaat. Namun proses ini kadang belum sepenuhnya menangkap keadaan dinamis masyarakat yang disebabkan karena keterbatasan pembaruan data, sehingga masih ada beberapa rumah tangga miskin yang tidak terdaftar sebagai calon penerima bantuan, serta rumah tangga yang secara ekonomi telah mengalami perbaikan tetapi masih tercatat sebagai penerima PKH (Alfrojems, Chairani 2024).

Dalam perencanaan teknokratis, sistem data mempunyai peran penting bukan hanya sebagai perangkat administrasi, tetapi juga sebagai basis untuk perencanaan kebijakan. DTKS digunakan sebagai dasar untuk menentukan jumlah alokasi anggaran, pembagian wilayah target, serta penilaian kinerja PKH secara nasional. Namun, efektivitas sistem data sangat ditentukan oleh tata kelola data yang mencakup ketepatan, integrasi, dan kesinambungan dalam pembaruan data. Kurangnya integrasi antara sistem data nasional dan mekanisme verifikasi di tingkat lokal mengakibatkan perencanaan teknokratis Program Keluarga Harapan (PKH) lebih bersifat administratif dan terpusat. Sebagai hasilnya, kebijakan yang dihasilkan secara teknis telah sesuai dengan standar prosedur, tetapi belum sepenuhnya peka terhadap keadaan sosial nyata masyarakat miskin di lapisan bawah. Nantinya hal tersebut akan berdampak pada ketetapan sasaran penerima program PKH. (Alfrojems, Chairani 2024).

Implementasi PKH dan Dinamika Gender

Dalam implementasi *Program Keluarga Harapan* (PKH), perempuan seringkali diposisikan sebagai penerima langsung bantuan tunai, biasanya melalui kartu dan rekening atas nama ibu rumah tangga. Posisi ini dipilih dengan asumsi bahwa perempuan lebih cenderung menggunakan sumber daya untuk kebutuhan keluarga seperti pendidikan anak dan kesehatan ibu-anak, sehingga menjadi sasaran utama intervensi PKH. Studi mengenai relasi gender dalam PKH menunjukkan bahwa meskipun perempuan secara administratif ditetapkan sebagai penerima utama, hal ini tidak otomatis mengubah struktur kekuasaan dalam rumah tangga. Dalam beberapa kasus, dominasi suami dalam keputusan penggunaan dana tetap kuat, karena norma budaya patriarki yang kuat di banyak komunitas Indonesia memengaruhi bagaimana bantuan tersebut dikelola dalam praktik sehari-hari (Syukri 2013).

Menjadi penerima utama PKH juga membawa bebanya sendiri bagi perempuan. Selain tanggung jawab administratif seperti menghadiri sesi pendampingan, mengambil bantuan di bank, dan memenuhi syarat laporan, perempuan sering menghadapi beban sosial tambahan dalam peran ganda sebagai pengurus rumah tangga dan pengelola bantuan sosial. Struktur sosial patriarki yang ada di banyak keluarga seringkali tidak sepenuhnya menganugerahkan kontrol penuh kepada perempuan atas dana tersebut, sehingga perempuan harus menavigasi dinamika kekuasaan internal keluarga saat mengelola bantuan. Situasi ini terkadang menambah tekanan sosial karena perempuan harus berperan melampaui tugas domestik biasa, termasuk sebagai perantara antara pendamping PKH dan keluarga, serta bertanggung jawab untuk memastikan komitmen syarat PKH dipenuhi (Saragih 2022).

Walaupun perempuan secara struktural ditetapkan sebagai penerima PKH dan memiliki akses ke sumber daya program, keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan strategis seringkali masih terbatas. Akses perempuan terhadap bantuan bersifat tinggi secara administratif (misalnya mereka yang menerima langsung dana tunai), tetapi ketika datang pada kontrol dan keputusan strategis dalam penggunaan bantuan, kekuasaan sering masih dibagi atau bahkan didominasi oleh suami atau anggota keluarga laki-laki lainnya. Hal ini mencerminkan bahwa perubahan dalam akses formal belum secara otomatis menghasilkan perubahan dalam relasi kekuasaan gender di dalam keluarga. Dengan kata lain, meskipun perempuan secara nominal menjadi penerima utama, keputusan strategis tentang penggunaan bantuan PKH masih sangat dipengaruhi oleh norma gender dan struktur patriarki dalam rumah tangga (Syukri 2013).

Dampak PKH Terhadap Kesetaraan Gender

Akses perempuan terhadap sumber daya, terutama sumber daya ekonomi dan layanan sosial dasar, telah meningkat secara signifikan berkat Program Keluarga Harapan. PKH membuat perempuan sebagai penerima manfaat utama, memberikan kontrol langsung atas bantuan keuangan keluarga. Dengan akses ini, perempuan dapat lebih aktif mengawasi pengeluaran rumah tangga mereka, terutama untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak, yang merupakan tujuan utama program. Karena perempuan memperoleh sumber daya yang secara langsung membantu mereka menjaga kesejahteraan keluarga, situasi ini membantu memenuhi kebutuhan praktis gender. Namun, peningkatan akses ini masih terbatas karena belum diikuti dengan peningkatan kapasitas ekonomi jangka panjang, seperti akses ke pekerjaan yang layak atau pelatihan keterampilan produktif. Akibatnya, dampaknya terhadap kemandirian perempuan masih sangat kecil (Vivin Monica Yosiana, Iwan Kurniawan Subagja 2025).

Program Keluarga Harapan (PKH) juga mengubah peran dan tanggung jawab perempuan dalam rumah tangga, terutama dalam hal pengambilan keputusan tentang pemenuhan kebutuhan anak dan pengelolaan keuangan. Posisi tawar perempuan dalam rumah tangga meningkat karena mereka cenderung memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan prioritas pengeluaran keluarga. Ini menunjukkan bahwa perempuan telah berkembang dari menjadi hanya petugas rumah tangga menjadi bagian penting dari manajemen kesejahteraan keluarga. Karena perempuan masih memegang peran utama dalam program, perubahan ini belum sepenuhnya transformatif. Kewajiban administrasi dan pemenuhan syarat PKH seringkali meningkatkan beban kerja perempuan, tanpa memberikan peran yang setara dengan laki-laki. Akibatnya, perempuan dalam praktiknya mengalami beban ganda. (Saragih 2022)

PKH memiliki dampak yang bersifat ganda dari perspektif gender. Secara positif, program ini dapat meningkatkan kepercayaan diri perempuan, memberi tahu orang betapa pentingnya peran mereka dalam keluarga, dan memberi orang kesempatan untuk lebih terlibat dalam keputusan rumah tangga. Penurunan kerentanan sosial perempuan dan anak juga dipengaruhi oleh peningkatan kesejahteraan keluarga melalui PKH. Di sisi lain, desain dan implementasi PKH yang tidak sepenuhnya responsif terhadap gender berpotensi memperkuat stereotip gender yang sudah ada. Penekanan pada peran perempuan sebagai pengelola bantuan dan penanggung jawab kesejahteraan keluarga dapat memperkuat gagasan bahwa perempuan sepenuhnya bertanggung jawab atas urusan domestik dan sosial, sementara peran laki-laki kurang terlibat. Meskipun perempuan mendapat manfaat ekonomi dari program, relasi gender yang timpang masih berisiko direproduksi (Alfrojems, Chairani 2024).

Kesenjangan antara Pendekatan Teknokratis dan Perspektif Gender

Dalam banyak proses perencanaan pembangunan, istilah *netral gender* sering disalahpahami sebagai perlakuan yang sama bagi semua orang tanpa melihat perbedaan pengalaman antara perempuan dan laki-laki. Padahal *neutrality* seperti ini justru bisa jadi buta gender (*gender-blind*) artinya perencana tidak benar-benar melihat apakah kebijakan tersebut membawa manfaat berbeda bagi perempuan dan laki-laki. Ketika perencanaan dianggap “tidak memihak”, sering kali ketimpangan sosial yang nyata di masyarakat justru tidak tertangkap karena tidak dianalisis secara spesifik berdasarkan gender. Contohnya dalam perencanaan layanan publik atau anggaran, ketika data tidak dipisah berdasarkan gender, kebutuhan khusus perempuan tidak terlihat dan rencana bisa jadi tidak efektif untuk mereka. Konsep ini mirip dengan kritik pada penelitian lain yang menunjukkan bahwa pendekatan *gender blind* dalam analisis kebijakan menghasilkan pemahaman yang tidak lengkap tentang realitas sosial.(Hawkes, Buse, and Kapilashrami 2017)

Pendekatan teknokratis sering mengandalkan data dan angka untuk mengambil keputusan. dalam banyak dokumen perencanaan pemerintah atau organisasi, indikator gender masih minim atau tidak terpisah menurut jenis kelamin. Misalnya, indikator seperti jumlah fasilitas layanan atau anggaran yang hanya dilaporkan secara umum tanpa merinci berapa banyak manfaat yang dirasakan laki-laki atau perempuan. Akibatnya, perencana tidak mendapatkan gambaran yang jelas tentang *kesenjangan gender* yang sesungguhnya. Ketika data tidak dibedakan menurut gender, begitu pula kebutuhan yang berbeda tidak terdeteksi dalam perencanaan.(Sugiyono 2024)

Analisis gender adalah proses melihat perbedaan peran, akses, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam setiap tahap perencanaan kebijakan. Integrasi analisis ini masih terbatas dalam banyak agenda teknokratis karena fokusnya lebih kepada aspek teknis

seperti efisiensi anggaran atau target kuantitatif. Namun tanpa analisis gender yang kuat, rencana pembangunan bisa saja menghasilkan hasil yang tidak setara, misalnya anggaran tidak memperhatikan kebutuhan khusus perempuan atau partisipasi perempuan dalam perencanaan masih rendah. Penelitian tentang perencanaan anggaran dengan perspektif gender di pemerintah daerah menunjukkan bahwa ketika integrasi perspektif gender masih rendah, partisipasi perempuan dalam keputusan anggaran juga rendah, yang berujung pada rencana yang kurang responsif gender (Ansari and Basir 2024).

Peluang dan Tantangan Pengarusutamaan Gender dalam Program Keluarga Harapan (PKH)

Peluang Pengarusutamaan Gender dalam Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki potensi dalam mendorong pengarusutamaan gender, khususnya melalui penempatan perempuan sebagai aktor utama dalam implementasi program. Secara teknokratis, PKH dirancang dengan mekanisme penargetan berbasis data kemiskinan dan indikator kesejahteraan keluarga, yang kemudian dioperasionalisasikan dengan menjadikan ibu rumah tangga sebagai penerima manfaat utama. Skema ini membuka ruang bagi penguatan posisi perempuan dalam rumah tangga, meskipun pada saat yang sama berpotensi mereproduksi peran gender tradisional apabila tidak disertai perspektif kesetaraan gender secara substantif.

Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Salah satu peluang utama pengarusutamaan gender dalam PKH terletak pada pemberdayaan ekonomi perempuan. Bantuan sosial PKH secara langsung disalurkan kepada perempuan, terutama ibu rumah tangga, meningkatkan akses dan kontrol mereka terhadap sumber daya ekonomi keluarga, perempuan penerima PKH memiliki peran yang dominan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga dan pengambilan keputusan terkait pengeluaran, terutama untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak. Kondisi ini memperkuat posisi tawar perempuan dalam lingkup domestik dan membuka peluang terjadinya redistribusi kekuasaan ekonomi dalam keluarga.

Namun pemberdayaan ekonomi ini masih bersifat instrumental, karena peran perempuan sebagai pengelola dana PKH sering kali dipandang sebagai perpanjangan dari tanggung jawab domestik, bukan sebagai pengakuan atas kapasitas ekonomi perempuan sebagai subjek pembangunan. Dengan demikian, peluang pengarusutamaan gender melalui PKH memerlukan penguatan dimensi kesadaran kritis agar tidak berhenti pada aspek administratif pengelolaan bantuan semata.

Akses Setara terhadap Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Dari perspektif perencanaan teknokratis, PKH mensyaratkan pemenuhan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan sebagai prasyarat pencairan bantuan. Ketentuan ini secara tidak langsung mendukung prinsip kesetaraan gender karena manfaat program dirasakan oleh seluruh anggota keluarga tanpa diskriminasi berbasis jenis kelamin. Anak perempuan memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk mengakses pendidikan dan layanan kesehatan, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Studi di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa PKH membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan gizi anak, termasuk anak perempuan, yang sebelumnya sering terpinggirkan akibat keterbatasan ekonomi (Erna Ermawati Chotim 2021). Dengan demikian, PKH memiliki peluang besar untuk memutus rantai kemiskinan struktural

berbasis gender apabila diintegrasikan dengan kebijakan afirmatif yang lebih sensitif terhadap kebutuhan perempuan dan anak perempuan.

Perubahan Dinamika Gender dalam Rumah Tangga

Meskipun PKH belum sepenuhnya mengubah konstruksi peran gender dalam keluarga, program ini menunjukkan potensi dalam mendorong perubahan dinamika relasi gender. Di beberapa wilayah, perempuan penerima PKH mulai menunjukkan peningkatan eksistensi di ruang publik dan berkontribusi pada pendapatan keluarga, baik melalui usaha rumahan maupun pekerjaan sektor informal (Erna Ermawati Chotim 2021). Kondisi ini membuka peluang terciptanya pembagian peran yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan.

Tantangan

Salah satu masalah utama dengan pengarusutamaan gender dalam Program Keluarga Harapan (PKH) adalah dominasi pendekatan teknokratis dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. PKH seringkali tidak mengintegrasikan perspektif gender karena lebih menekankan pencapaian target administratif, kepatuhan penerima manfaat, dan efektivitas penyaluran bantuan. Akibatnya, perempuan lebih sering dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan program daripada sebagai subjek yang mengalami ketimpangan struktural dalam pemberdayaan.

Salah satu masalah lain adalah penguatan peran gender konvensional dalam pelaksanaan PKH. Menempatkan perempuan sebagai penerima manfaat utama secara tidak langsung menegaskan bahwa urusan kesejahteraan keluarga adalah tanggung jawab perempuan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan beban kerja domestik perempuan dan menghambat terciptanya relasi gender yang lebih setara karena laki-laki masih terbatas untuk berpartisipasi dalam tanggung jawab program. Selain itu, kurangnya kemampuan pelaksana di tingkat lokal menghambat pengarusutamaan gender dalam PKH. Ini karena pendamping program biasanya lebih tertarik pada hal-hal teknis dan administrasi daripada memahami keadilan gender. Akibatnya, implementasi PKH belum sepenuhnya responsif gender dan belum mendorong perubahan transformatif dalam relasi sosial (Ibnu Panji Arifin, Tyas Retno Wulan 2021).

Secara keseluruhan, masalah pengarusutamaan gender dalam PKH terdiri dari dominasi pendekatan teknokratis, penguatan peran gender tradisional, dan kurangnya kemampuan untuk menerapkan perspektif gender di lapangan. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan program PKH sebagai program penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya diiringi dengan pencapaian tujuan kesetaraan gender. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi pengarusutamaan gender yang lebih substantif dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pendekatan teknokratis dalam Program Keluarga Harapan (PKH) sangat berpengaruh dalam meningkatkan keefektifan dan akurasi target program perlindungan sosial di tanah air. Penerapan data yang terintegrasi, parameter kinerja, dan sistem administrasi yang teratur memungkinkan PKH untuk menargetkan keluarga kurang mampu dengan yang tepat. Dalam hal ini, wanita, khususnya para ibu rumah tangga, diposisikan sebagai penerima manfaat utama serta pengelola bantuan, sehingga mereka mendapatkan akses langsung ke sumber daya ekonomi dan layanan sosial dasar.

Dari perspektif gender, perencanaan dan implementasi program PKH memiliki dampak yang bersifat ganda. Di satu sisi, PKH menciptakan kesempatan untuk memperbaiki posisi perempuan di dalam rumah tangga, memperluas partisipasi perempuan dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan anak, serta mendukung pemenuhan kebutuhan praktis gender. Akses langsung ke bantuan sosial juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan keterlibatan perempuan dalam pengelolaan kesejahteraan keluarga. Namun di sisi lain, metode teknokratis yang fokus pada pencapaian target administratif dan kepatuhan terhadap program belum sepenuhnya diimbangi dengan penerapan perspektif gender yang mendalam. Penempatan perempuan sebagai aktor utama dalam Program Keluarga Harapan (PKH) masih cenderung mempertahankan peran gender tradisional dan meningkatkan beban ganda bagi perempuan, tanpa disertai perubahan signifikan dalam hubungan kekuasaan di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun PKH berfungsi dengan baik secara teknokratis sebagai program pengentasan kemiskinan, pencapaian kesetaraan gender yang benar-benar transformatif masih menghadapi beragam kendala.

Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai dampak perencanaan teknokratis terhadap kesetaraan gender dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), pendekatan perencanaan kebijakan tidak semata-mata menitikberatkan pada pencapaian metrik administratif dan efektivitas program. Analisis gender yang lebih mendalam harus disertakan dalam perencanaan teknokratis PKH sejak tahap perumusan kebijakan, sehingga program menjadikan perempuan sebagai penerima manfaat utama dan memberi mereka kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian mereka sendiri. Selain itu, pelaksanaan PKH harus ditingkatkan untuk mengurangi beban ganda perempuan dengan mendorong laki-laki untuk mengambil tanggung jawab program dan pengasuhan keluarga. Penguatan kemampuan pendamping PKH melalui pelatihan yang berperspektif gender juga menjadi penting agar pelaksanaan program lebih sensitif terhadap ketimpangan relasi gender di tingkat rumah tangga. Akibatnya, PKH diharapkan tidak hanya efektif sebagai alat untuk memerangi kemiskinan, tetapi juga dapat membantu mewujudkan kesetaraan gender yang lebih adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfrojems, Chairani, Triyana Anugraihin. 2024. “Public Trust : Dampak Exclusion Dan Inclusion Error Data Program Keluarga Harapan TNP2K Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan . Mandat Tim Yang Terdiri D.” 12(Maret): 116–25.
- Ansari, Muhammad Ihsan, and Indra Basir. 2024. “Jurnal Proaksi Gender Perspective In Budget Planning : A Phenomenological Study On The Preparation Of The Regional Budget In Majene Regency.” 11(3): 611–25. doi:10.32534/jpk.v11i3.6269.
- Erna Ermawati Chotim, Nur AffifahAl Jannah. 2021. “PENGARUH PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , Dan Akuntansi).” 5(1): 921–37.
- Hawkes, Sarah, Kent Buse, and Anuj Kapilashrami. 2017. “Gender Blind ? An Analysis of Global Public- Private Partnerships for Health.” : 1–11. doi:10.1186/s12992-017-0249-1.

- Ibnu Panji Arifin, Tyas Retno Wulan, Soetji Lestari. 2021. "Perempuan Dan Bantuan Sosial (Studi Upaya Pemberdayaan Perempuan Melalui Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan)." 2(12).
- Nainggolan, Togtiartua. 2010. "ASPEK GENDER DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN Abstrak Sejak Dimulai Pada Tahun 2007 , Program Keluarga Harapan (PKH) Juga Dimaksudkan Sebagai Upaya Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Atau Millennium Development Goals (MDGs). Tujuan Pembangunan Milen." (200): 1–14.
- Nuraeni, Yeni, and Ivan Lilin Suryono. 2021. "Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 20(1): 68–79. doi:10.35967/njip.v20i1.134.
- Saragih, Dina Elina. 2022. "Pengembangan Masyarakat Berbasis Gender : Analisis Program Dana Desa Dan Program Keluarga Harapan." 11(1): 49–65. doi:10.14421/welfare.2022.111-04.
- Sugiyono. 2024. "Analisis Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (Studi)." 4(4): 143–156.
- Syukri, Muhammad. 2013. "Is Conditionality Pro-Women ? A Case Study of Conditional Cash Transfer in Indonesia A Case Study of Conditional Cash Transfer." (February).
- Vivin Monica Yosiana, Iwan Kurniawan Subagja, Azos Hakim. 2025. "Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p – ISSN: 2541-0849 SEKRETARIAT DITJEN GTK KEMDIKBUDRISTEK Pendahuluan Gender Adalah Konsep Yang Mengacu Pada Peran-Peran Dan Tanggung Jawab Laki- Laki Dan Perempuan Yang Terjadi Akibat Dari Dan Dapat Berubah Ole." 10(1): 54–62.